

ABSTRAK

Nama : Christabela Anata

NIM : 01659210075

Judu : Pengaturan Peredaran *Second-hand Clothing* di Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Dagang WTO.

Fenomena perdagangan *second-hand clothing* atau pakaian bekas, terdapat isu yang terjadi secara nasional maupun internasional. Diikuti dengan tingkat penjualan pakaian bekas yang terus meningkat pada beberapa tahun terakhir, pada periode tahun 2021-2023. Penulisan ilmiah ini secara spesifik akan memberikan penelitian pada sudut pandang terhadap peredaran *second-hand clothing* melalui peraturan perundang-undangan Indonesia dengan peraturan dagang WTO. Dengan menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, yang mana melakukan analisa terhadap 2 peraturan. Pada hakikatnya perdagangan internasional memiliki pedoman terhadap peraturan WTO yang ditujukan kepada semua anggota, termasuk Indonesia. *Second-hand clothing*. Ditemukan 2 hasil penelitian, yaitu Indonesia memiliki serangkaian peraturan perundang-undangan terkait perdagangan, diatur dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengatur perdagangan baik secara nasional maupun internasional. Serta larangan terhadap perdagangan *second-hand clothing* yang diatur pada Permendag No. 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Kemudian, keselarasan hukum Indonesia dengan peraturan *Sanitary and Phytosanitary Measures*. Dengan terbuktinya dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, yang dianggap sah sesuai dengan perjanjian SPS. Dalam keselarasan dengan salah satu prinsip dagang WTO yaitu, non-diskriminasi yang terdiri dari *Most Favoured Nation* dan *National Treatment*. Ditemukannya posibilitas celah hukum pada salah satu prinsip yang dikhawatirkan dapat memberikan kesulitan bagi pihak pemerintah dalam upaya penanganan permasalahan SHC di Indonesia.

Kata Kunci: *Second-hand Clothing*, Perdagangan Internasional, *WTO Agreement*

ABSTRACT

Name : Christabela Anata

Student ID : 01659210075

Title : The Phenomenon of Second-hand Clothing Trade: An Analysis of Indonesian Legislation within the Framework of WTO Trade Regulations.

The trade of second-hand clothing, also known as used or pre-owned garments, has been a subject of both national and international issues. Over the past few years, the sales of second-hand clothing have steadily increased, particularly during the period from 2021 to 2023. This thesis focuses on conducting research from a juridical-normative perspective on the circulation of second-hand clothing in Indonesia, considering its compliance with both Indonesian legislation and the regulations set by the World Trade Organization (WTO). The study employs a legal analysis of two regulations: the Indonesian Trade Law No. 7 of 2014, which governs domestic and international trade, and the Indonesian Trade Ministry Regulation No. 51 of 2015, which prohibits the import of used clothing. Additionally, the paper examines Indonesia's legal alignment with the Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) Agreement. The negative impacts of second-hand clothing on public health and the environment have been substantiated, thus validating its relevance to the SPS Agreement. The research further explores how Indonesia's trade practices adhere to the non-discriminatory principles of the WTO, encompassing both Most Favoured Nation and National Treatment. Finally, the study identifies potential legal loopholes in one of these principles, which could pose challenges for the government in addressing the issue of second-hand clothing trade in Indonesia.

Keywords: Second-hand Clothing, International Trade, WTO Agreement